

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/ Subyek Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data penelitian primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Instansi Pemerintah di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh data yang ditunjukkan pada tabel 4.1 yang menunjukkan secara ringkas mengenai jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuisisioner yang dijawab oleh responden.

Tabel 4.1.
Sampel dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah
Total Penyebaran Kuesioner	83
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	11
Jumlah kuesioner yang kembali	72
Jumlah kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat)	3
Total Kuesioner yang akan diolah	69
<i>Reponse Rate</i> (tingkat pengembalian)	86,75 %

Sumber : data kuesioner penelitian

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 83 kuesioner yang disebarkan kepada responden jumlah kuesioner yang kembali adalah 72 eksemplar atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai response rate sebesar 86,25%. Dari jumlah

kuesioner yang kembali diperoleh kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat) yaitu sejumlah 3 eksemplar. Sehingga kuesioner yang diolah dalam penelitian ini yaitu sejumlah 69 eksemplar.

2. Demografi Responden

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti dengan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh melalui perhitungan statistik deskriptif. Meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dilihat pada table berikut :

Tabel 4.2.
Karakteristik berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	42	60,87%
Perempuan	27	39,13%
Total	69	100%

Sumber : data kuesioner penelitian

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 42 orang (60,87%), dan perempuan berjumlah 27 orang (39,13%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3.
Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
19 -26 tahun	4	5,8 %
27-34 tahun	6	8,7 %
35- 45 tahun	27	39,1 %
46 – 55 tahun	25	36,2 %
56 tahun ke atas	7	10,2%
Total	69	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3. responden yang berusia antara 19-26 tahun berjumlah 4 orang (5,8 %), untuk responden berusia antara 27-34 tahun berjumlah 6 orang (8,7%), lalu responden yang berusia antara 35-42 tahun berjumlah 27 orang (39,1%), selanjutnya responden yang berusia 43-50 tahun berjumlah 25 orang (39,2%), dan responden dengan usia antara 51 tahun ke atas berjumlah 7 orang (10,2%).

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah yang berusia antara 35-45 tahun, hal ini dikarenakan responden yang diperlukan adalah pegawai yang ikut serta dalam proses menjalankan tugas dan fungsi. Hal ini sesuai

dengan produktifitas dari seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada usia-usia ini.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.4.
Karakteristik berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
SLTA	11	16%
D3	13	18,8%
S1	35	50,7%
S2	10	14,5%
Total	69	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 untuk responden berdasarkan jenjang pendidikan didapatkan bahwa jenjang pendidikan SLTA berjumlah 11 orang (16%), jenjang pendidikan D3 berjumlah 13 orang (18,8%), jenjang pendidikan S1 berjumlah 35 orang (50,7%), dan jenjang pendidikan S2 berjumlah 10 orang (14,5%). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki jenjang pendidikan yang baik yaitu sebesar 50,7% untuk S1, dan responden juga memiliki jenjang pendidikan yang cukup yaitu 16% untuk SLTA.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.5.
Karakteristik berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Prosentase
0-5 tahun	6	8,7%
6-10 tahun	8	11,6%
11-15 tahun	10	14,5%
16-20 tahun	25	36,3%
21 tahun ke atas	20	28,9%
Total	69	100%

sumber: data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.5 untuk responden berdasarkan masa kerja didapatkan bahwa responden yang memiliki masa kerja antara 0-5 tahun berjumlah 6 orang (8,7%), responden dengan masa kerja antara 6-10 tahun berjumlah 8 orang (11,6%), responden dengan masa kerja antara 11-15 tahun berjumlah 8 orang (14,5%), responden dengan masa kerja antara 16-20 tahun berjumlah 25 orang (26,3%), dan responden dengan masa kerja 21 tahun ke atas berjumlah 20 orang (28,9%). Presentase dalam penyebaran kuesioner berdasarkan pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi dalam proses memberikan pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat faktor loading antara butir-butir pernyataan dengan total skor jawaban. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Berdasarkan pengujian dengan SPSS *for windows* versi 20.0 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Faktor Loading	Cut Off	Keterangan
SP	SP1	0,526	0,40	Valid
	SP2	0,639	0,40	Valid
	SP3	0,579	0,40	Valid
	SP4	0,566	0,40	Valid
	SP5	0,506	0,40	Valid
	SP6	0,779	0,40	Valid
KPPP	KPPP1	0,175	0,40	Tidak Valid
	KPPP2	0,032	0,40	Tidak Valid
	KPPP3	0,378	0,40	Tidak Valid
	KPPP4	0,804	0,40	Valid
	KPPP5	0,877	0,40	Valid
PBK	PBK1	0,681	0,40	Valid
	PBK2	0,683	0,40	Valid
	PBK3	0,600	0,40	Valid
	PBK4	0,694	0,40	Valid
	PBK5	0,355	0,40	Tidak Valid
AKIP	AKIP1	0,656	0,40	Valid
	AKIP2	0,467	0,40	Valid
	AKIP3	0,312	0,40	Tidak Valid
	AKIP4	0,568	0,40	Valid
	AKIP5	0,690	0,40	Valid
	AKIP6	0,594	0,40	Valid

Variabel	Item	Faktor Loading	Cut Off	Keterangan
AKIP	AKIP7	0,468	0,40	Valid
	AKIP8	0,576	0,40	Valid
	AKIP9	0,545	0,40	Valid

sumber : data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.6. menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner kecuali butir pertanyaan KPPP1, KPPP2, KPPP3, PBK5, AKIP3 mempunyai factor loading $<$ *cut off*, Dengan demikian item seluruh pertanyaan dalam sistem pelaporan valid, ketaatan pada peraturan perundangan ada 2 butir pertanyaan yang valid, penganggaran berbasis kinerja ada 4 butir pertanyaan valid, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ada 8 butir pertanyaan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,60. Hasil uji validitas terhadap data penelitian ini disajikan pada table 4.7. sebagai beriku

Tabel 4.7.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabel	Keterangan
SP	0,645	0,60	Reliabel
KPPP	0,689	0,60	Reliabel
PBK	0,601	0,60	Reliabel
AKIP	0,714	0,60	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah 2016

Pada table 4.7. menunjukkan nilai *cronbach's alpha* sistem pelaporan sebesar 0,645, ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0,689, penganggaran berbasis kinerja sebesar 0,601, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,714. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu/residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan metode uji *One- Sample Kolmogorov-Smirnov (KS)* dengan melihat hasil *Asymp. Sig (2-tailed)*. Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 4.8. berikut:

Tabel 4.8.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.86999236
	Absolute	.074
Most Extreme Differences	Positive	.073
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.612
Asymp. Sig. (2-tailed)		.848

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar $0,848 > \alpha (0,05)$, karena nilai *sig* lebih besar dari *alpha* (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah yang memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 10% atau 0,1 dan nilai *Variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10 yang

dilihat dari hasil Regresi Berganda. Untuk melihat hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.10. sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
SP	0.793	1.262	Bebas Multikolinieritas
KPPP	0.848	1.179	Bebas Multikolinieritas
PBK	0.849	1.178	Bebas Multikolinieritas

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.9. menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik pada uji heteroskedastisitas adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser* yang dilihat dari nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05). Untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Standar	Keterangan
SP	0,170	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KPPP	0,229	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PBK	0,060	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.10. dapat diketahui bahwa nilai *sig* pada masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Persamaan Regresi Berganda

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang mengandung interaksi dengan variabel independen atau *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Tabel 4.11.
Hasil Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8.387	2.938		2.855	.006		
1 SP	.193	.111	.160	1.740	.087	.793	1.262
KPPP	.749	.223	.300	3.365	.001	.848	1.179
PBK	.852	.146	.519	5.825	.000	.849	1.178

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : data primer yang diolah, 2016

$$AKIP = 8,387 + 0,193 + 0,749 + 852 + e$$

2. Hasil Uji t (parsial)

a. Hasil pengujian H1

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Sistem pelaporan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)”. Untuk membuktikan hipotesis pertama bisa dilihat pada tabel 4.11.

Dari hasil pengolahan data, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.087. Nilai ini tidak signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.087 > 0.05$. maka H1 ditolak. Artinya, sistem pelaporan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

b. Hasil Pengujian H2

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “ketaatan pada perundangan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)”. Untuk membuktikan hipotesis kedua bisa dilihat pada tabel 4.11.

Dari hasil pengolahan data, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.001. Nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.001 > 0.05$. maka H2

diterima. Artinya, ketaatan pada peraturan perundangan pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

c. Hasil Pengujian H3

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)”. Untuk membuktikan hipotesis ketiga bisa dilihat pada tabel 4.11.

Dari hasil pengolahan data, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu $\alpha = 0.05$, dimana $0.000 > 0.05$. maka H2 diterima. Artinya, penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

3. Hasil Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Hasil uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	305.430	3	101.810	27.830	.000 ^b
1 Residual	237.787	65	3.658		
Total	543.217	68			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), PBK, KPPP, SP

Sumber: data yang diolah. 2016

Dari tabel 4.13. dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 27,830 dan $\text{sig F } (0,000) < \alpha (0,05)$ artinya bahwa sistem pelaporan, ketaatan paa peraturan perundangan dan penganggaran berbasis kinerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*Adj.R²*). Hasil Uji Adjusted R Square adalah sebagai berikut:

Table 4.13
Hasil Uji *Adjusted R Square*
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.750 ^a	.562	.542	1.913	.562	27.830	3	65	.000	1.621

a. Predictors: (Constant), PBK, KPPP, SP

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: data yang diolah , 2016

Berdasarkan tabel 4.14. menunjukkan bahwa besaran nilai koefisien determinasi adalah 0,127 yang artinya bahwa 12,7% variabel kinerja SKPD dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi. Sedangkan sisanya 87,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

D. Pembahasan (Interpretasi)

1. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi dimana pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan sistem pelaporan yang tersedia untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya menjadi lebih baik lagi.

Laporan pelaksanaan kegiatan tidak diterbitkan secara rutin setiap bulannya dan tidak memperhatikan waktu dalam pembuatan laporan secara periodik. sehingga sistem pelaporan tidak terlaksana dengan baik karena tidak tepat waktu.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh setiawan, dkk (2013) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hal ini disebabkan oleh ketaatan pada peraturan perundangan dapat dijadikan sebagai acuan sebuah instansi pemerintah dalam melakukan semua kegiatannya untuk melayani masyarakat. Dengan adanya ketaatan pada peraturan pada perundangan,

diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem civil law, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian informasi keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riantiarno dan Azlina (2011) bahwa terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Aini, dkk (2014) menyatakan Ketaatan pada peraturan perundangan (KPP) memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

3. Pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah hal ini disebabkan oleh penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggung-jawaban, dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

Tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah. Oleh karena itu anggaran seharusnya mempunyai kualitas yang baik dan realistis, pelaksanaan anggaran yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspriati (2012) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Endrayani, dkk (2014) menyatakan

bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah